

EFEKTIVITAS PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN MELALUI APLIKASI E-KATALOG DI KANTOR DPRD KABUPATEN SIDOARJO

Sri Sugiarti¹, Hadi Susanto², Sri Mulyani³

¹Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo, ^{2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Wijaya Putra
srisugiarti.sd@gmail.com

Abstrak

Pengadaan makanan dan minuman di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui aplikasi e-Katalog sebagai wujud implementasi digitalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan aplikasi e-Katalog dalam pengadaan makanan dan minuman di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan tiga dimensi utama yaitu efektivitas hasil, efektivitas integrasi, dan efektivitas adaptasi organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi Ketua DPRD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom), Pejabat Pengadaan, staf administrasi pengadaan, dan penyedia catering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-Katalog telah meningkatkan ketepatan waktu pengadaan, kepatuhan terhadap regulasi (Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025), efisiensi anggaran, transparansi proses, dan kepuasan pengguna. Integrasi antarunit kerja telah berjalan secara prosedural meskipun belum sepenuhnya substantif. Adaptasi teknis aparatur sudah berlangsung, namun adaptasi budaya kerja dan penyempurnaan SOP masih diperlukan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa e-Katalog efektif dalam meningkatkan kinerja pengadaan makanan dan minuman di DPRD Kabupaten Sidoarjo, namun perlu penguatan kapasitas SDM dan peningkatan fleksibilitas sistem untuk menghadapi kebutuhan kegiatan yang dinamis.

Kata Kunci: Efektivitas; E-Katalog; Pengadaan; Transparansi; Akuntabilitas

Abstract

The procurement of food and beverages at the Sidoarjo Regency DPRD Office is conducted through the e-Catalog application as an implementation of government electronic procurement. This study aims to evaluate the effectiveness of the e-Catalog application in food and beverage procurement at the Sidoarjo Regency DPRD Office using three main dimensions: effectiveness of outcomes, integration effectiveness, and organizational adaptation effectiveness. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Informants included the Chairman of the Regional Parliament, Commitment Making Officials, Procurement Officials, administrative staff, and catering providers. Results indicate that the e-Catalog has improved procurement timeliness, regulatory compliance (Presidential Regulation No. 46 of 2025), budget efficiency, process transparency, and user satisfaction. Inter-unit integration has been running procedurally, though not yet fully substantive. Technical adaptation by officials has occurred, but work culture adaptation and Standard Operating Procedure refinement are still needed. The conclusion is that the e-Catalog is effective in improving food and beverage procurement performance at the Sidoarjo Regency Regional Parliament, yet human resource capacity strengthening and system flexibility improvement are needed to address dynamic activity requirements.

Keywords: Effectiveness; E-Catalog; Procurement; Transparency; Accountability

Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, pemerintah Indonesia secara progresif mengembangkan sistem digital dalam pelayanan publik. Salah satu wujud konkret dari transformasi tersebut adalah implementasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik melalui aplikasi e-Katalog. E-Katalog merupakan sistem informasi elektronik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memuat daftar produk, spesifikasi teknis, harga, serta informasi penyedia yang telah terstandarisasi dan dapat diakses secara nasional.

Pengadaan makanan dan minuman merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung aktivitas lembaga pemerintahan, termasuk di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, kegiatan DPRD sangat erat kaitannya dengan agenda formal seperti rapat paripurna, kunjungan kerja, audiensi, dan forum diskusi yang membutuhkan dukungan logistik konsumsi yang layak dan tepat waktu.

DPRD Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan pengadaan makanan dan minuman melalui sistem e-Katalog sebagai bentuk adaptasi terhadap kebijakan nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, serta edaran Bupati nomor 000/16888/438.1.2/2025, penggunaan e-Katalog diwajibkan untuk pengadaan barang dan jasa apabila tersedia dalam katalog elektronik.

Meskipun sistem e-Katalog menawarkan berbagai keunggulan, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan pilihan penyedia yang sesuai kebutuhan lokal, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem, serta minimnya sosialisasi teknis di tingkat operasional. Puspitasari (2020) menyatakan bahwa keberhasilan sistem pengadaan elektronik sangat tergantung pada kualitas pelaksana dan keandalan sistem pendukung yang tersedia.

Efektivitas merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan kebijakan publik. Menurut Mahmudi (2010), efektivitas dapat dimaknai sebagai tingkat pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Dalam konteks pengadaan makanan dan minuman, efektivitas dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaksanaan, kesesuaian volume dan kualitas makanan, serta efisiensi penggunaan anggaran.

Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama yaitu: (1) hasil yang dicapai dalam pengadaan makanan dan minuman melalui e-Katalog, (2) bentuk integrasi antarunit kerja dalam proses pengadaan, dan (3) bentuk adaptasi organisasi dan aparatur dalam menghadapi perubahan sistem pengadaan berbasis digital. Fokus ini penting karena belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas pengadaan makanan dan minuman di lingkungan lembaga legislatif daerah menggunakan pendekatan tiga dimensi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil pengadaan makanan dan minuman melalui aplikasi e-Katalog di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana bentuk integrasi dalam pengadaan makanan dan minuman melalui aplikasi e-Katalog di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana bentuk adaptasi organisasi dan aparatur dalam pengadaan makanan dan minuman melalui aplikasi e-Katalog di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami fenomena secara mendalam mengenai efektivitas pengadaan makanan dan minuman melalui aplikasi e-Katalog di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo (Moleong, 2017). Lokasi penelitian adalah Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Informan penelitian ditentukan secara purposive dengan kriteria keterlibatan langsung dalam proses pengadaan. Informan meliputi: (1) H. Abdillah Nasih, S.M., M., selaku Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo; (2) Kresno Hartono, SE., selaku PPKOM Bagian Umum; (3) Diana Kholida Hasan, S.Sos., selaku PPKOM Bagian Perundang-undangan dan Persidangan; (4) Oki Arliansyah Putra, SE., selaku Pejabat Pengadaan/POKJA; (5) M. Naufal Kamaludin, selaku Administrasi Makan dan Minum; dan (6) CV. Andhika Sri Rejeki sebagai penyedia catering.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilaksanakan pada tanggal 6, 13, dan 20 Oktober 2025 di kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Dimensi efektivitas yang digunakan sebagai kerangka analisis merujuk pada tiga aspek, yaitu: (1) Efektivitas Hasil, yang mengukur sejauh mana tujuan pengadaan tercapai sesuai perencanaan; (2) Efektivitas Integrasi, yang mengukur kualitas koordinasi dan keterpaduan antarunit kerja; dan (3) Efektivitas Adaptasi, yang mengukur kemampuan organisasi dan aparatur dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem digital

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Hasil Pengadaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-Katalog di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo telah memberikan kemudahan dalam proses pemesanan, mempercepat waktu pengadaan, serta meningkatkan transparansi harga dan pemilihan

penyedia. Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara administratif dan prosedural, pengadaan melalui e-Katalog mampu menghasilkan output yang lebih tertib dan terkontrol.

Dimensi pertama efektivitas hasil diukur melalui lima indikator kinerja utama pengadaan:

- 1) **Ketepatan waktu pengadaan.** Ketepatan waktu merupakan indikator kinerja yang penting karena sistem e-Katalog dirancang untuk menyederhanakan proses administrasi dan mempercepat pemilihan penyedia. Kresno Hartono, SE. (PPKOM Bagian Umum) menyatakan bahwa "Pelaksanaan pengadaan yang sesuai jadwal menunjukkan mekanisme e-Katalog berjalan secara efisien dan responsif." Ketua DPRD H. Abdillah Nasih, S.M., M. menambahkan bahwa dalam transaksi e-Katalog, proses melalui digitalisasi sehingga semua pengadaan bisa terekam di aplikasi. CV. Andhika Sri Rejeki sebagai penyedia catering mengonfirmasi bahwa e-Katalog mempersingkat waktu administrasi sehingga kegiatan pelayanan lebih cepat dan lancar.
- 2) **Kepatuhan terhadap regulasi.** Seluruh informan menyepakati bahwa e-Katalog memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Diana Kholida Hasan, S.Sos. menyatakan bahwa kinerja bukan hanya soal apa yang dihasilkan, tetapi juga bagaimana proses pencapaiannya melalui kepatuhan terhadap standar yang ada. Oki Arliansyah Putra, SE. menambahkan bahwa administrasi berbasis digital seharusnya sudah mencakup aturan yang berlaku sehingga mengurangi kecurangan dalam prosesnya.
- 3) **Efisiensi penggunaan anggaran.** E-Katalog memungkinkan instansi memperoleh barang dengan harga yang kompetitif dan terukur. Ketua DPRD menyatakan bahwa di e-Katalog terdapat banyak pilihan harga sesuai kebutuhan dan dalam era efisiensi anggaran wajib mencari harga yang baik dan sesuai kualitas. Oki Arliansyah Putra menekankan konsep Value for Money (VfM), bukan sekadar harga murah, melainkan optimalisasi seluruh komponen pengadaan.
- 4) **Transparansi proses pengadaan.** Kresno Hartono, SE. menjelaskan bahwa transparansi tercermin dari keterbukaan informasi terkait spesifikasi, harga, dan

penyedia yang dapat diakses berbagai pemangku kepentingan, sehingga mengurangi asimetri informasi. M. Naufal Kamaludin menyatakan bahwa transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan dalam pengadaan e-Katalog karena dengan keterbukaan informasi, proses pengadaan menjadi lebih akuntabel.

- 5) **Kepuasan pengguna.** Kepuasan pengguna merupakan indikator akhir yang mencerminkan kesesuaian barang dan jasa dengan kebutuhan organisasi. Diana Kholida Hasan menyatakan bahwa jika empat indikator sebelumnya (waktu, kepatuhan, efisiensi, dan transparansi) telah berjalan baik, maka puncaknya adalah munculnya kepuasan dari pengguna. CV. Andhika Sri Rejeki mengonfirmasi bahwa sistem e-Katalog memangkas waktu dan lebih efisien sehingga baik pengguna maupun penyedia sama-sama terbantuan.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Robbins (2015) yang menyatakan bahwa *effectiveness is the degree to which an organization achieves its goals*. Dalam konteks pengadaan di DPRD Kabupaten Sidoarjo, tujuan pengadaan berupa ketepatan waktu, kepastian harga, dan akuntabilitas proses secara umum telah tercapai. Mardiasmo (2009) juga menekankan bahwa efektivitas dalam sektor publik tidak dapat dipisahkan dari prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Namun demikian, efektivitas hasil masih dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan kegiatan DPRD yang bersifat fluktuatif dan sering berubah dalam waktu singkat. Kondisi ini menyebabkan tidak semua kebutuhan dapat diakomodasi secara optimal melalui sistem e-Katalog. Hal ini sejalan dengan temuan Rahmawati (2021) yang menunjukkan bahwa meskipun e-Katalog secara umum meningkatkan efisiensi pengadaan di pemerintah daerah, masih terdapat gap antara ketersediaan produk di katalog dengan kebutuhan riil instansi

Efektivitas Integrasi dalam Proses Pengadaan

Efektivitas integrasi dalam pengadaan makanan dan minuman melalui e-Katalog berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam membangun koordinasi dan keterpaduan antarunit kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antara bagian perencanaan, keuangan, dan pelaksana pengadaan telah berjalan sesuai prosedur. Alur

pengadaan relatif jelas dan didukung oleh sistem yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan daerah.

Integrasi dalam pengadaan di Kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo mencakup beberapa aspek. Pertama, integrasi sistem digital di mana aplikasi e-Katalog mengintegrasikan proses perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan transaksi, hingga pelaporan dalam satu sistem yang transparan dan terdokumentasi. Kedua, integrasi regulasi yang terlihat pada sinkronisasi antara kebutuhan pengguna, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal.

Hal ini sejalan dengan pandangan Sedarmayanti (2014) yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan koordinasi antarunit kerja. Nugroho (2015) juga menegaskan bahwa sistem digital akan sulit memberikan hasil maksimal tanpa didukung oleh integrasi kelembagaan yang kuat dan koordinasi lintas fungsi yang terstruktur.

Namun, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa integrasi yang terjadi masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif. Koordinasi antarunit kerja cenderung berjalan mengikuti alur formal, tetapi belum sepenuhnya didukung oleh perencanaan bersama yang adaptif terhadap perubahan agenda kegiatan DPRD yang bersifat politis dan dinamis. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas integrasi belum optimal, terutama ketika dihadapkan pada kebutuhan pengadaan yang muncul secara mendadak.

Dalam konteks administrasi publik, integrasi tidak hanya dimaknai sebagai keterhubungan sistem, tetapi juga sebagai keselarasan kerja antaraktor dan unit organisasi. Ketika integrasi hanya berjalan pada level administratif, efektivitas pengadaan berpotensi terhambat oleh keterbatasan fleksibilitas organisasi. Oleh karena itu, penguatan integrasi substantif antarunit kerja menjadi aspek penting dalam meningkatkan efektivitas pengadaan

Efektivitas Adaptasi Organisasi dan Aparatur

Efektivitas adaptasi berkaitan dengan kemampuan organisasi dan aparatur dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sistem pengadaan dari manual ke digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar aparatur di Kantor DPRD Kabupaten

Sidoarjo telah mampu mengoperasikan aplikasi e-Katalog dan memahami prosedur dasar pengadaan elektronik.

Bentuk adaptasi yang terjadi mencakup tiga aspek. Pertama, adaptasi teknis aparatur di mana para pejabat pengadaan beradaptasi dengan sistem digital yang menuntut ketepatan waktu, pemahaman regulasi, dan ketelitian dalam memilih produk dan penyedia. Kedua, adaptasi pengguna layanan yang semakin terbiasa dengan proses pengadaan yang transparan, cepat, dan berbasis data. Ketiga, adaptasi penyedia catering yang menyesuaikan standar kualitas, harga, dan kelengkapan informasi produk dalam sistem e-Katalog.

Adaptasi struktural juga tercermin dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan yang mendukung penggunaan e-Katalog. Keberadaan SOP menunjukkan adanya upaya organisasi untuk menyesuaikan prosedur kerja dengan sistem digital. Hal ini sejalan dengan pandangan Wijayanti (2019) yang menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi teknologi di sektor publik sangat bergantung pada komitmen pimpinan dalam menyediakan fasilitas, kebijakan insentif, dan lingkungan kerja yang mendukung pembaruan.

Namun demikian, adaptasi tidak hanya menyangkut penguasaan teknis, tetapi juga perubahan kebiasaan kerja dan pola pikir aparatur. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat kendala dalam hal pembiasaan sistem digital, terutama dalam menghadapi kebutuhan pengadaan yang bersifat mendesak. Soebagio (2018) menyatakan bahwa kegagalan reformasi sistem sering bukan disebabkan oleh buruknya desain teknologi, melainkan karena rendahnya kesiapan pelaksana dalam mengubah kebiasaan lama.

Selain itu, SOP yang telah disusun belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika kegiatan DPRD yang sering berubah. Siagian (2003) menyatakan bahwa organisasi yang efektif adalah yang mampu merespons perubahan lingkungan secara cepat melalui penyesuaian strategi dan budaya kerja. Dwiyanto (2006) juga menekankan bahwa efektivitas pelayanan publik sangat dipengaruhi kemampuan penyelenggara dalam merespons kebutuhan secara cepat dan tepat.

Tabel 1.
Rangkuman Pembahasan Penelitian

No	Uraian Masalah	Dimensi Efektivitas	Hasil Penelitian	Analisa
1	Hasil yang dicapai dalam pengadaan makanan dan minuman melalui e-Katalog	Efektivitas Hasil	Pengadaan dinilai lebih cepat, transparan, patuh regulasi, efisien anggaran, dan menghasilkan kepuasan pengguna relatif tinggi dibanding mekanisme manual	Tujuan pengadaan secara administratif dan fungsional telah tercapai. Efektivitas hasil tercermin dari ketercapaian output dan outcome, meskipun dipengaruhi dinamika kebutuhan kegiatan DPRD yang fluktuatif
2	Hasil yang dicapai dalam pengadaan makanan dan minuman melalui e-Katalog	Efektivitas Hasil	Seluruh proses pengadaan terekam secara digital, memudahkan pengawasan, pertanggungjawaban, dan pembayaran	Efektivitas hasil tidak hanya dari kecepatan dan efisiensi, tetapi juga dari meningkatnya akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari kinerja organisasi publik
3	Bentuk integrasi dalam pengadaan melalui e-Katalog	Efektivitas Integrasi	Koordinasi antarunit kerja (perencanaan, keuangan, pelaksana pengadaan) telah berjalan, namun belum sepenuhnya sinkron	Integrasi administratif telah terbentuk, tetapi masih prosedural. Penguatan komunikasi dan perencanaan bersama diperlukan agar integrasi juga bersifat substantif
4	Bentuk integrasi dalam pengadaan melalui e-Katalog	Efektivitas Integrasi	Integrasi sistem e-Katalog dengan sistem keuangan daerah membantu pengendalian anggaran dan kepatuhan prosedural	Integrasi sistem berperan penting, namun fleksibilitasnya masih terbatas dalam merespons kebutuhan mendadak kegiatan DPRD
5	Bentuk adaptasi dalam pengadaan melalui e-Katalog	Efektivitas Adaptasi	Aparatur umumnya mampu mengoperasikan e-Katalog, meskipun masih ada kendala kebiasaan kerja dan pembiasaan sistem digital	Adaptasi teknis telah berlangsung, namun adaptasi budaya kerja dan mindset organisasi membutuhkan waktu dan penguatan berkelanjutan
6	Bentuk adaptasi dalam pengadaan melalui e-Katalog	Efektivitas Adaptasi	SOP pengadaan telah disusun untuk mendukung penggunaan e-Katalog	Adaptasi struktural sudah ada, tetapi SOP belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika kegiatan DPRD yang sering berubah

Sumber : data primer (2026)

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengadaan makanan dan minuman melalui aplikasi e-Katalog di Kantor DPRD

Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kinerja yang positif dan efektif dari tiga dimensi utama.

Pertama, dari dimensi efektivitas hasil, pengadaan melalui e-Katalog dinilai berhasil memenuhi lima indikator utama yaitu ketepatan waktu pengadaan, kepatuhan terhadap regulasi (Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025), efisiensi penggunaan anggaran, transparansi proses pengadaan, dan kepuasan pengguna. Proses digital mampu memangkas birokrasi, mempercepat administrasi, dan memastikan seluruh tahapan pengadaan terekam secara sistematis dalam aplikasi sehingga memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.

Kedua, dari dimensi efektivitas integrasi, aplikasi e-Katalog telah mengintegrasikan proses perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan transaksi, hingga pelaporan dalam satu sistem yang transparan. Koordinasi antarunit kerja telah berjalan secara prosedural, namun masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif. Penguatan komunikasi dan perencanaan bersama yang adaptif terhadap dinamika kegiatan DPRD masih diperlukan.

Ketiga, dari dimensi efektivitas adaptasi, aparatur pengadaan umumnya telah mampu mengoperasikan e-Katalog dan memahami prosedur dasar pengadaan elektronik. Adaptasi teknis telah berlangsung, namun adaptasi budaya kerja dan pola pikir organisasi membutuhkan waktu dan penguatan berkelanjutan. SOP pengadaan yang ada juga belum sepenuhnya mengakomodasi dinamika kegiatan DPRD yang bersifat politis dan tidak selalu dapat diprediksi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang direkomendasikan meliputi:

1. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan reguler tentang sistem e-Katalog dan regulasi pengadaan terkini;
2. Evaluasi berkala terhadap kinerja penyedia makanan dan minuman untuk menjaga kualitas layanan;
3. Penguatan pengawasan internal guna memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mencegah penyimpangan;
4. Penyempurnaan SOP pengadaan agar lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan kegiatan DPRD;

5. Peningkatan integrasi e-Katalog dengan sistem perencanaan dan keuangan daerah secara menyeluruh.

Referensi

- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Firmansyah, R. (2018). *Good Governance dan Pengadaan Publik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Handayani, S. (2023). Perbandingan Efektivitas Pengadaan Manual dan E-Katalog di Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen Publik*, 9(1), 33–47.
- Kurniawan, A. (2020). Implementasi E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 134–143.
- LKPP. (2021). *Pedoman Pengadaan Melalui E-Katalog Tahun 2021*. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia.
- LKPP. (2023). *Panduan Penggunaan E-Katalog*. www.lkpp.go.id
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L.J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2015). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, B. (2020). Pengaruh Penggunaan E-Katalog terhadap Efisiensi Pengadaan Makanan di Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(1), 45–58.
- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Puspitasari, D. (2020). Evaluasi Penggunaan E-Katalog dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 145–158.
- Rahmawati, E. (2021). Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Katalog di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 124–134.
- Robbins, S.P. (2015). *Organizational Behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, S.P. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soebagio, H. (2018). *Manajemen Perubahan dalam Organisasi Pemerintahan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Susanti, W. (2021). Efektivitas Sistem E-Katalog dalam Meningkatkan Transparansi Pengadaan. *Jurnal Teknologi Informasi Pemerintahan*, 5(3), 203–211.
- Wijayanti, A. (2019). Adaptasi Organisasi terhadap Sistem E-Procurement di Pemerintah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 23–35.